

**Judul** : Mendagri larang pejabat gelar pesta mewah dan pamer harta  
**Tanggal** : Kamis, 04 September 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## Mendagri Larang Pejabat Gelar Pesta Mewah Dan Pamer Harta

Aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, bukan hanya berpengaruh terhadap kondisi di Pemerintahan pusat. Tetapi, berpengaruh juga pada Pemerintahan Daerah (Pemda).

Pemda sebelumnya harus memutar otak akibat DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dipotong oleh Pemerintah Pusat, terpaksa harus mengikat pinggang lagi. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan himbauan kepada Pemda untuk melakukan penghematan lagi.

Pemda diinstruksikan untuk menunda kegiatan daerah yang bersifat seremonial. Pernyataan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara hybrid, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

"Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan," ucap Tito, dalam paparannya.

Apalagi, dengan musik-musik seperti pesta di tengah situasi seperti ini sangat sensitif. Tito juga meminta agar kegiatan daerah, termasuk ulang tahun daerah, digelar secara sederhana.

Mantan Kapolri ini menyarankan agar kepala daerah mengubah acara seremonial menjadi kegiatan bermanfaat. Seperti tumpangan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu. "Itu jauh lebih bermanfaat di tengah situasi saat ini," lanjut dia.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar kepala daerah tidak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dan tidak menggelar acara berlebihan seperti pesta mewah atau hiburan besar.

Ia juga pentingnya peran kepala daerah dalam menciptakan situasi kondusif di tengah meningkatnya aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir. "Ini diperlukan untuk meredam keresahan publik serta menjaga stabilitas sosial di daerah," katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menyambut baik arahan Mendagri tersebut. Namun, kata dia,

Pemerintah Daerah juga harus melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan pengawasannya.

"Libatkan dialog dan transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada publik. Agar publik bisa ikut mengawasi," ujar Dede kepada *Rakyat Merdeka* melalui pesan WhatsApp, Selasa (2/9/2025).

Sementara, Manager Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi mengingatkan kepada Pemerintah agar memberikan contoh dan teladan terlebih dahulu sebelum memerintahkan kepada Pemda. Jangan hanya memerintahkan Pemda untuk penghematan, sementara Pemerintah tidak melakukannya. Contohnya, banyaknya jumlah kabinet dan menaikkan berbagai tunjangan untuk pejabat.

Untuk mengetahui lebih jelas pandangan dari Dede Yusuf Macan Effendi dan Badiul Hadi mengenai arahan Mendagri agar kepala daerah menunda acara seremonial dan pemborosan anggaran, berikut wawancaranya.

### DEDE YUSUF MACAN EFFENDI

Wakil Ketua Komisi II DPR

## Saat Ini, Diperlukan Rasa Empati-Simpati



Libatkan dialog dengan publik, dan transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada publik.

Bagaimana Anda melihat arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar Kepala Daerah untuk menunda acara seremonial dan pemborosan anggaran?

Setuju, saat ini kita harus fokus pada persatuan dan rasa kebersamaan dengan masyarakat.

Apakah ini sebagai langkah efektif meredakan situasi yang memanas belakangan?

Susana empati dan simpati sangat diperlukan saat ini, agar Pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan seremonial atau pemborosan anggaran.

Artinya, acara seremonial bisa dialihkan kepada hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat ya? Hentikan dulu pembangunan yang sifatnya menara gading, atau estetik.

Di satu sisi, saat ini sudah memasuki bulan September, menuju akhir tahun, apakah ini tidak akan mengganggu proses penyerapan anggaran?

Penyerapan anggaran tetap harus dipercepat, mengingat pertumbuhan ekonomi harus segera terjadi. Namun fokuskan kepada proyek yang menyentuh langsung kepada lapangan kerja dan belanja masyarakat.

Terkait proyek yang menyentuh lapangan kerja dan belanja masyarakat, ini seperti apa ya? Fokuskan pada pembangunan yang padat karya. Hal ini diharapkan dapat mengisi lapangan kerja.

Adakah saran kepada kepala daerah agar proses pemerintahan bisa berjalan dengan lancar namun tetap menjaga kondusifitas di tengah masyarakat?

Libatkan dialog dengan publik, dan transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada publik. Agar publik bisa ikut mengawasi.

Mengenai keterlibatan dan pengawasan masyarakat dalam pembangunan daerah, selama ini Anda melihatnya seperti apa?

Ada yang namanya Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), aktifkan kembali dengan mendahulukan usulan masyarakat.

Lalu, apakah penganggaran semacam bansos, santunan dan kegiatan sosial lainnya bisa lebih diutamakan untuk saat ini?

Bantuan langsung untuk mengurangi beban masyarakat sangat dibutuhkan. Bisa berupa beasiswa, operasi pasar murah, dan lain-lain. ■ **REN**

### BADIUL HADI

Manager Riset Seknas Fitra

## Pemerintah Harus Kasih Contoh Dulu



Keteladanan dan contoh ini penting, sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam mendukung agenda efisiensi anggaran Presiden.

Kemarin, Mendagri memberikan himbauan kepada Pemda agar tidak menggelar acara seremonial. Apa respons Anda?

Pernyataan Mendagri agar Pemda berhenti menunda acara seremonial memang penting dan perlu ditindaklanjuti oleh daerah. Namun, imbauan tersebut akan lebih kredibel jika diiringi dengan keteladanan dan contoh terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat.

Keteladanan dan contoh ini penting, sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam mendukung agenda efisiensi anggaran Presiden.

Apa keteladanan dari Pemerintah yang Anda maksud?

Misalnya terkait dengan rangkap jabatan Wamen. Malukah Konstitusi telah menetapkan bahwa larangan rangkap jabatan yang semula hanya

berlaku bagi menteri kini juga mencakup Wakil Menteri.

MK menegaskan bahwa Wamen sebagai pejabat negara harus fokus mengurus tugas kementerian, dan praktik rangkap jabatan (misalnya sebagai komisaris BUMN) dapat menimbulkan konflik kepentingan serta mengganggu akuntabilitas publik.

Putusan MK ini harus dijalankan oleh Pemerintah, agar pelayanan Pemerintah kepada masyarakat semakin fokus dan berkualitas. Karena para pejabat publik memiliki fokus.

Maksud Anda, Pemerintah harus memberikan contoh efisiensi terlebih dahulu sebelum menyuruh Pemda?

Iya. Bagaimana Pemda mau mengikuti Pemerintah jika hal kecil seperti rangkap jabatan saja tidak dilak-

sanakan.

Makanya, penting bagi Pemerintah segera menyesuaikan UU dan peraturan terkait (seperti PP/Perpres) agar mencantumkan jelas bahwa Wamen dilarang merangkap jabatan seperti yang diputus MK, dan memberikan batas waktu implementasi.

Apa lagi kebijakan yang musti dilakukan Pemerintah untuk efisiensi?

Terkait jumlah kementerian atau lembaga yang terus bertambah, sebaiknya Pemerintah meninjau atau mengevaluasi efektivitas kementerian dan jumlah Wamen, kurang posisi yang tidak perlu untuk memotong biaya dan birokrasi.

Jika perlu potong dan kurangi tunjangan para menteri dan pejabat BUMN demi penghematan dan efisiensi anggaran. ■ **REN**